

Transformasi Mata Pencarian Pascatambang Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Pariwisata: Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Tebing Breksi Sambirejo

*Post-Mining Livelihood Transformation through Tourism-Based MSME
Development: An Analysis of Community Empowerment at Tebing Breksi,
Sambirejo*

Muhammad Gufran Tuanaya*

Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Indonesia

muhammadgufrantuanaya@mail.ugm.ac.id

Hanisya Azzahra Larasati

Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Indonesia

hanisyaaazzahralarasati@mail.ugm.ac.id

Ambar Teguh Sulistiyani

Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Indonesia

ambarteguh@ugm.ac.id

Amanda Elista

Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Indonesia

amandaelista999@gmail.com

*Corresponding Author:

Received : 04-05-2026 || Revised: 21-07-2026 || Accepted: 30-07-2026 || Published: 31-07-2026

Abstract

The transformation of livelihoods among the people of Sambirejo from mining to tourism management presents a significant challenge. The loss of local livelihoods following the closure of the mining operations has contributed to an increase in poverty in Sambirejo Village. The transition from a mining-dependent community to a tourism-oriented community has posed a particular challenge to community empowerment in Sambirejo Village, as residents are required to assume roles as micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) operators. This study aims to analyze the process of MSME empowerment and the social value generated in supporting the transformation of community livelihoods. The study employs an approach based on the Social Return on Investment (SROI) framework. The findings indicate that, cumulatively, the success of



MSME empowerment at Tebing Breksi can be understood as the outcome of interconnected processes involving livelihood transformation, access to the local economy, institutional strengthening, and the social benefits experienced by the community. The transformation of the area from a mining site into a tourism destination has created new economic opportunities for the residents of Sambirejo. This success is reflected in the emergence of business opportunities for local communities, the development of their capacity for self-organization, and improvements in their quality of life. The findings primarily reflect the experiences and perspectives of the interviewed informants and therefore cannot be generalized to all MSME operators in the Tebing Breksi area. This study provides the perspective that the SROI framework can be applied as a qualitative analytical approach to evaluating the social value of MSME empowerment in post-mining tourism areas.

Transformasi usaha masyarakat sambirejo dari penambang menuju pengelola pariwisata menunjukkan tantangan yang luar biasa. Hilangnya mata pencaharian penduduk setempat pasca penutupan tambang telah meningkatkan angka kemiskinan di Desa Sambirejo. Proses transisi dari masyarakat penambang menuju pengelola pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sambirejo di mana, harus menjalankan peran sebagai pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan UMKM serta nilai sosial yang dihasilkan dalam mendukung transformasi mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan kerangka SROI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara akumulatif keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi dapat dipahami sebagai hasil dari keterhubungan antara transformasi penghidupan, akses ekonomi lokal, penguatan kelembagaan, hingga pada manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Transformasi yang bermula dari kawasan tambang menjadi destinasi wisata telah menciptakan struktur peluang ekonomi baru bagi warga Sambirejo. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh terbukanya ruang usaha bagi masyarakat lokal, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi diri, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Temuan yang didapatkan lebih menunjukkan pengalaman dan sudut pandang informan yang diwawancarai sehingga tak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku UMKM di kawasan Tebing Breksi. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa kerangka SROI dapat diterapkan sebagai pendekatan analisis kualitatif untuk mengevaluasi nilai sosial pemberdayaan UMKM pada kawasan wisata pascatambang.

Keywords: tourism, MSME transformation, community empowerment

How to Cite: Tuanaya, G., Larasati, H. A., Sulistiyani, A. T. ., & Elista, A. . (2026). Transformasi Mata Pencaharian Pascatambang Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Pariwisata: Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Tebing Breksi Sambirejo. *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 162–181. <https://doi.org/10.70742/ijpap.v1i2.1149>

INTRODUCTION

Pengembangan pariwisata di Tebing Breksi, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman menunjukkan fenomena yang dapat dijelaskan oleh Ellis (2000) bahwasannya masyarakat desa biasanya melakukan diversifikasi mata pencaharian ketika sumber penghidupan utama telah mengalami perubahan sehingga memerlukan

alternatif sumber penghasilan untuk melanjutkan hidup. Fenomena tersebut terjadi karena sebelum berkembang menjadi destinasi wisata, kawasan Tebing Breksi merupakan area penambangan batu breksi di mana batu tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk bahan bangunan serbaguna seperti penyusunan dinding maupun kandang dan lain sebagainya sejak tahun 1980-an (Kusumaningrum & Ridlo, 2023).

Berdasarkan penelitian Geologi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam Iqbal, Nadia, & Saiddinullah (2020) ditemukan bahwa Tebing Breksi memiliki nilai historis di mana wilayah tersebut merupakan singkapan batuan hasil endapan batuan tuffan dari abu vulkanik Gunung Api Purba. Adanya penemuan tersebutlah, Kawasan Tebing Breksi pada akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari warisan geologi yang patut untuk dilestarikan sehingga ditetapkan sebagai kawasan *geoheritage*. Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY. Sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, aktivitas penambangan resmi diberhentikan dan kawasan tersebut dijadikan sebagai lokasi konservasi dan pengembangan geowisata.

Berdasarkan penjelasan pengelola Tebing Breksi, yang kini disebut sebagai Desa Wisata Sambirejo (Dewi Sambi), Widiyanto, K, peralihan tersebut secara resmi berlangsung pada tahun 2015 dan menjadi titik awal perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dari yang semula pada sektor pertambangan menuju sektor pariwisata. Sebagai pengelola Tebing Breksi, Widiyanto, K juga menjelaskan bahwa proses transformasi dari yang semula sebagai penambang hingga menjadi pelaku wisata membutuhkan waktu yang panjang, dimulai dari pembentukan kelompok sadar wisata, penguatan organisasi masyarakat, serta pembangunan berbagai sarana-prasarana pendukung pariwisata. Dalam riset tentang pembangunan masyarakat, transformasi ini dikenal sebagai *livelihood transformation*, yakni pergeseran cara mencari pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat akibat perubahan kondisi ekonomi, lingkungan, maupun kebijakan pembangunan (Ellis, 2000). Dari adanya hal ini terlihat bahwa keberhasilan transformasi harus turut didukung dengan kemampuan adaptasi dari masyarakat.

Salah satu bentuk adaptasi ini terlihat melalui berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Tebing Breksi yang menjadi titik fokus penelitian ini. Berdasarkan penjelasan Widiyanto, K, sejak beralih menjadi objek geowisata pada tahun 2015 yang menghadirkan banyak wisatawan, pengelola Tebing Breksi mengharuskan untuk melakukan pemenuhan layanan pariwisata seperti kuliner, transportasi wisata, jasa fotografi, *homestay*, *souvenir* dan lain sebagainya. Kasus Ibu Dwi menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Sebagai anak dari orang tua yang dahulu menjadi penambang di Tebing Breksi, Ibu Dwi kini terlibat sebagai pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari peralihan sektor pertambangan menjadi pariwisata. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat setempat yang kehilangan mata pencaharian sebagai penambang tidak ditinggal begitu saja melainkan diberdayakan agar dapat mempertahankan kehidupan keluarga mereka. Dari adanya hal ini juga terlihat bahwa masyarakat melakukan adaptasi terhadap peluang yang muncul dari adanya perubahan fungsi kawasan.

Meskipun begitu, berkembangnya UMKM tidak serta-merta menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat sudah berhasil. Keberhasilan pemberdayaan perlu dilihat juga sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya, kesempatan berpartisipasi, peningkatan kapasitas, dan kemampuan mengendalikan arah pengembangan di wilayahnya (Scheyvens & van der Watt, 2021). Dalam hal pengembangan wisata berbasis masyarakat, UMKM dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ketika mampu menciptakan peluang pendapatan, memperkuat kapasitas kewirausahaan, memperluas akses terhadap modal dan pelatihan, dan mendorong kemandirian ekonomi yang juga turut disertai dengan dukungan dari kelembagaan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri (Rachmawati et al., 2021; Bambang et al., 2023; Mannahali et al., 2024; Yudha et al., 2025).

Dalam konteks Tebing Breksi, ciri tersebut terlihat dari terbentuknya kelembagaan lokal yakni Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sambimulyo yang didirikan pada tahun 2016. Secara eksplisit dalam dokumen profil BUMKal Sambimulyo (2025), pendiriannya bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberdayakan masyarakat. Terlebih, 90% masyarakat yang diberdayakan merupakan warga lokal. dalam dokumen profil BUMKal Sambimulyo (2025) juga dijelaskan bahwa pengelolaan wisata ini telah melibatkan sekitar 524 orang di mana, mereka bekerja sebagai pengelola wisata, pengemudi *jeep* wisata, pedagang (termasuk UMKM), fotografer, *tour guide*, hingga tenaga pembangunan. Dari adanya hal ini terlihat bahwa secara eksplisit, BUMKal mulai membentuk ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Meskipun telah membentuk ekosistem ekonomi, tetap perlu dilihat sejauh mana manfaat ekonomi yang dirasakan benar-benar menghasilkan nilai sosial yang berkelanjutan sehingga memerlukan pendekatan yang mampu melihat manfaat ekonomi dan sosial secara bersamaan pada konteks UMKM yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah *Social Return on Investment* (SROI). SROI mengevaluasi bagaimana suatu kegiatan dapat menghasilkan perubahan sosial (Nicholls, 2017). Dalam konteks Tebing Breksi, pendekatan SROI relevan untuk memahami apakah pengembangan UMKM berbasis pariwisata hanya menghasilkan keuntungan ekonomi semata atau juga dapat menciptakan nilai sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, kajian ini menganalisis transformasi UMKM lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat di Tebing Breksi Sambirejo pasca perubahan kawasan tambang menjadi geoheritage (wisata) karena. Analisis diarahkan pada perubahan mata pencaharian, bentuk dukungan pemberdayaan, peran kelompok UMKM, peningkatan kualitas hidup, serta nilai sosial yang muncul melalui pendekatan SROI. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang muncul untuk dapat menjawab analisis di atas ialah: Bagaimana transformasi UMKM lokal dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan menciptakan nilai sosial di Tebing Breksi Sambirejo pasca perubahan kawasan tambang menjadi destinasi wisata?

Dalam tulisan Mardikanto & Soebiato (2015) secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kemampuan. Sedangkan menurut Sulistiyan, A.T (2017) menjelaskan, berbeda dari istilah etimologis, pemberdayaan lebih diartikan sebagai proses menuju berdaya atau proses untuk mendapatkan daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Lebih lanjut, Sulistiyani, A.T (2017) menjelaskan bahwa “proses” menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah menuju penguasaan sikap dan keterampilan yang lebih baik; “mendapatkan” daya/kekuatan/kemampuan menunjukkan bahwa masyarakat itu sendiri yang menjadi inisiatif untuk berdaya di mana, hal seperti ini hanya akan terjadi ketika masyarakat telah menyadari ketidakmampuannya tetapi juga disertai dengan kesadaran akan perlunya mendapatkan daya; “pemberian” mengindikasikan adanya inisiatif untuk alihkan daya dari pihak lain yang mempunyai kekuatan seperti pemerintah atau agen pembangunan lain.

UMKM mengambil peran penting terhadap perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 60,5% per Desember 2023 sekaligus menyerap tenaga kerja hingga 97% (Suyanto, A., 2024). Menurut Putri & Nailufar (2022) UMKM juga berperan sebagai strategi untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, pengentasan kemiskinan, dan sebagai sarana pemasukan devisa negara. Dalam hal pengentasan kemiskinan, UMKM mempunyai kapasitas sebagai ruang transisi ekonomi bagi masyarakat yang mengalami pergeseran basis penghasilan. Scoones (1998) menerangkan bahwa masyarakat akan memanfaatkan aset yang mereka miliki seperti *human capital*, *social capital*, *financial capital*, *physical capital*, atau *natural capital* agar dapat menciptakan strategi penghasilan baru ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Diperkuat oleh Ellis (2000) bahwa ketika sumber kehidupan utama mengalami perubahan, masyarakat cenderung tidak langsung meninggalkan wilayah atau komunitasnya melainkan melakukan diversifikasi mata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia di lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks perubahan kawasan dari pertambangan menjadi pariwisata, proses tersebut memerlukan tata kelola yang dapat mengkoordinasikan interaksi antar pemangku kepentingan dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan Bersama (Rhodes, 1996). Kemudian, proses tersebut juga tak lepas dari adanya peran *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan aktor lainnya sebagai dasar pengelolaan destinasi wisata. Di samping itu, kelembagaan desa juga berperan sebagai wadah yang mengorganisasikan partisipasi masyarakat, mengelola potensi lokal, serta menjembatani pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa (Uphoff, 1986). Kelembagaan desa tersebut turut menentukan keberhasilan transformasi dari pengimplementasian kebijakan terkait kawasan tebing breksi menjadi wilayah konservasi dan pengembangan geowisata. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk menciptakan *public value* dengan memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dari adanya pemberdayaan pelaku UMKM di kawasan tebing breksi.

METHOD

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis evaluatif berdasarkan kerangka *Social Return on Investment* (SROI) milik Nicholls (2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena ingin memahami dan menunjukkan terkait gambaran

proses transformasi mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan UMKM di Tebing Breksi melalui pengalaman dan pendapat pelaku yang terlibat. Hal ini sesuai dengan gagasan Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat memahami fenomena yang dialami oleh informan lalu mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. Di samping itu, penelitian deskriptif kualitatif akan menekankan gambaran tentang suatu fenomena melalui data empiris yang ditemukan di lapangan (Sandelowski, 2000). Analisis evaluatif berdasarkan kerangka SROI dimanfaatkan untuk identifikasi dan memetakan nilai sosial yang muncul dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Tebing Breksi.

SROI merupakan pendekatan yang digunakan untuk dapat memahami, mengukur, memetakan perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang muncul dari adanya suatu kegiatan (Nicholls, 2017). Dimana, dalam konteks ini ialah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Dalam praktiknya, SROI tak hanya fokus pada manfaat ekonomi yang dirasakan tetapi, juga perubahan sosial yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Akan tetapi, penelitian ini tak sepenuhnya melakukan perhitungan rasio SROI karena, adanya keterbatasan data secara kuantitatif. Maka dari itu, SROI dalam konteks ini digunakan untuk mengeksplor evaluasi agar dapat memetakan input, output, outcome, dan impact yang dihasilkan dari pengembangan UMKM setelah penutupan kawasan pertambangan di Tebing Breksi. Melalui pendekatan ini lebih memungkinkan peneliti untuk dapat memahami sejauh mana kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan berkontribusi terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal. Elemen SROI dan operasionalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Elemen SROI

ELEMEN SROI	DEFINISI	OPERASIONALISASI FOKUS ANALISIS
<i>Input</i>	Pemanfaatan sumber daya untuk melakukan aktivitas atau intervensi.	Dukungan pemerintah, sarana-prasarana, lokasi usaha, pelatihan, kegiatan pemberdayaan.
<i>Output</i>	Produk atau kegiatan yang muncul dari penggunaan <i>input</i> .	Produk dan kegiatan UMKM yang terbentuk, pembentukan kelompok, pelaku usaha yang terlibat.
<i>Outcome</i>	Perubahan dari sisi pemangku kepentingan sebagai akibat dari <i>output</i> .	Perubahan ekonomi, kapasitas/keterampilan berwirausaha, kualitas hidup, kemandirian masyarakat.

<i>Impact</i>	<i>Outcome</i> yang sudah dikurangi faktor eksternal sehingga menggambarkan perubahan yang dihasilkan dari program/kegiatan.	Pergeseran mata pencaharian dan perubahan struktur ekonomi lokal.
<i>Sustainability</i>	Keberlanjutan manfaat	Menjaga keberlangsungan manfaat melalui promosi destinasi.

Sumber: diolah peneliti dari Nicholls (2017)

Dari adanya penjelasan dan pemetaan tiap elemen di atas, kerangka SROI dikontekstkan ke dalam penelitian berdasarkan temuan lapangan dengan ditambahkan pula elemen keberlanjutan sebagai analisis pelengkap. Hal tersebut digunakan untuk dapat melihat sejauh mana manfaat sosial maupun ekonomi yang dihasilkan dapat terus dipertahankan dalam upaya mendukung transformasi mata pencaharian masyarakat pasca penutupan penambangan di kawasan Tebing Breksi.

Lokasi dan Informan

Penelitian dilaksanakan pada kawasan *geoheritage* Tebing Breksi yang berlokasi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lokasi ini dipilih karena, menjadi lokasi dalam kuliah lapangan untuk melihat transformasi kawasan pascatambang yang berkembang menjadi destinasi wisata sehingga memunculkan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar, contohnya pengembangan UMKM. Kemudian, informan dalam penelitian ini ialah para pelaku UMKM di kawasan Tebing Breksi yang berasal dari warga lokal maupun luar daerah. Kriteria informan meliputi: (1) terlibat secara langsung dalam kegiatan UMKM di kawasan Tebing Breksi, (2) memiliki pengalaman terkait perkembangan kawasan wisata, dan (3) mampu menjelaskan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi setelah berkembangnya pariwisata.

Dari warga lokal terdapat Ibu Dwi di mana, memegang posisi penting sebagai ketua kelompok UMKM serta turut berperan dalam menjelaskan pengalaman yang terjadi pada keluarganya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses perubahan penghasilan masyarakat setempat dari sektor pertambangan menjadi sektor pariwisata dalam hal pengembangan UMKM. Kemudian, Ibu Monica yang berasal dari luar daerah dengan tujuan untuk mendapatkan sudut pandang pembanding tentang dampak pengembangan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan sudut pandang dari pelaku usaha dari luar daerah, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah manfaat ekonomi yang muncul dari adanya kegiatan pariwisata di Tebing Breksi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal atau malah lebih banyak menguntungkan pihak luar daerah. Maka dari itu, informan di atas memberikan penggambaran sudut pandang yang saling melengkapi guna memahami fenomena. Pemilihan informan tersebut juga berfokus pada seseorang yang paling memahami terkait proses transformasi mata pencaharian melalui pengembangan UMKM,

sehingga bukan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh pelaku UMKM di Tebing Breksi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2013:225) ialah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi langsung non partisipatif di mana, peneliti datang secara langsung namun, mempertahankan posisi sebagai tamu (Kostera dalam Tawakkal & Rohman, 2022). Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari para pelaku UMKM tentang pengalaman dan pandangan terhadap perubahan yang terjadi sejak Tebing Breksi beralih menjadi destinasi wisata. Selain wawancara, digunakannya juga observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi lapak usaha, kegiatan usaha, sarana & prasarana yang tersedia, dan interaksi antara pelaku UMKM dengan wisatawan

Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan sebagai data dukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memotret keadaan sekitar terkait fenomena, catatan lapangan, dan potret informasi visual yang berkaitan dengan aktivitas UMKM dan kondisi wisata Tebing Breksi. Selain itu, studi pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dari data yang sudah dikumpulkan supaya data yang ada juga didukung dengan sumber valid yakni berasal dari artikel penelitian, media massa, atau postingan berita.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan penjelasan dari Miles & Huberman dalam Sugiyono (2013:247), teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat 4 proses yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. (1) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan informasi terkait kondisi masyarakat setempat sebelum dan sesudah berkembangnya Tebing Breksi sebagai kawasan geoheritage, kegiatan UMKM yang sedang dilakukan, dan transformasi sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setempat. (2) Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang sudah didapatkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi diseleksi untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pendekatan yang digunakan yakni kerangka analisis SROI.

Data yang ditransformasi disini merupakan data yang didapatkan dari wawancara karena, data masih berada dalam bentuk audio sehingga diharuskan untuk ditransformasikan menjadi narasi. (3) Penyajian data yaitu penyusunan data yang telah dilakukan kondensasi dalam bentuk uraian, tabel, dan lain sebagainya. Penyajian data ini digunakan untuk memetakan temuan berdasarkan elemen SROI. (4) Verifikasi/penarikan kesimpulan yakni penafsiran temuan dan pemeriksaan kembali konsistensi data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana

pengembangan UMKM di Tebing Breksi berkontribusi pada transformasi sumber kehidupan masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan atas perubahan tersebut.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi. Triangulasi merupakan penggunaan data lain diluar dari data yang diperoleh sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan di awal (Sugiyono, 2013:274). Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara membandingkan informasi yang telah diperoleh dari informan utama dengan informan pendukung. Data yang didapatkan dari Ibu Dwi sebagai pelaku UMKM lokal dibandingkan dengan data yang didapatkan dari Ibu Monica sebagai pelaku yang berasal dari luar wilayah. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian atau perbedaan pandangan terkait dampak dari adanya pengembangan UMKM terhadap perubahan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan geoheritage Tebing Breksi.

Di samping itu, peneliti juga melakukan cross check antara hasil wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informasi mengenai aktivitas usaha, kondisi fasilitas, atau interaksi pelaku UMKM dengan wisatawan yang didapatkan dari wawancara dilakukan verifikasi dengan observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian. Adanya hal ini, data yang digunakan dalam penelitian telah melalui proses pengecekan dari berbagai sumber sehingga dapat memberikan gambaran utuh terkait transformasi mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan UMKM di kawasan Tebing Breksi.

RESULTS AND DISCUSSION

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan mengenai transformasi UMKM lokal dalam pemberdayaan masyarakat di Tebing Breksi Sambirejo. Temuan dianalisis melalui kerangka Social Return on Investment (SROI) secara eksploratif dengan menelusuri hubungan antara input, output, outcome, impact, dan keberlanjutan. Karena penelitian ini berbasis data kualitatif dan data kuantitatif monetisasi dampak belum tersedia secara lengkap, pembahasan tidak diarahkan untuk menghitung rasio SROI, tetapi untuk menunjukkan bagaimana perubahan penghidupan, akses ekonomi lokal, kelembagaan UMKM, dan manfaat sosial terbentuk dalam proses pemberdayaan masyarakat pascatambang.

Transformasi Penghidupan dan Keberpihakan Akses Ekonomi Lokal

Untuk melihat keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Sambirejo, maka perlu dimulai dari mengetahui bagaimana proses Transformasi Tebing Breksi dari kawasan tambang menjadi destinasi wisata. Perubahan ini tentu tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan fungsi lahan semata, tetapi juga sebagai perubahan basis penghidupan masyarakat Sambirejo itu sendiri. Sebelum berkembang jauh sebagai destinasi wisata, Tebing Breksi dikenal sebagai area penambangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Aktivitas ekonomi masyarakat sebelumnya bertumpu pada pengambilan material dari kawasan tebing. Namun, setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari geoheritage dan kemudian

dikembangkan sebagai objek geowisata, maka terjadi perubahan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi jasa berbasis pariwisata.

Perubahan tersebut menjadi penting karena pengembangan pariwisata sejatinya tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan. Scheyvens (1999) dalam penelitiannya menegaskan bahwa wisata berbasis alam atau ekowisata hanya dapat dianggap berhasil dari perspektif pembangunan apabila masyarakat lokal memiliki kontrol tertentu atas kegiatan wisata dan memperoleh pembagian manfaat secara adil. Artinya, keberhasilan Tebing Breksi tidak cukup bila hanya dilihat dari perubahan fisik kawasan atau peningkatan jumlah kunjungan semata, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh ruang ekonomi, akses pengelolaan, dan manfaat sosial dari perubahan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan konteks Tebing Breksi, karena perubahan kawasan tambang menjadi wisata tidak hanya berhenti pada konservasi geologi, tetapi kemudian diarahkan juga untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, proses tersebut dapat dilihat melalui tahapan pemberdayaan yang ditawarkan oleh Sulistiyani (2017). Pemberdayaan tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses bertahap. Tahap pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku sadar serta peduli; tahap kedua adalah transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar; sedangkan tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan sehingga masyarakat mampu membentuk inisiatif dan kemandirian (Sulistiyani, 2017). Dalam hal ini, kasus Tebing Breksi menunjukkan arah yang sejalan dengan tahapan tersebut. Masyarakat tidak hanya menerima perubahan fungsi kawasan semata, tetapi mulai melihat potensi baru dari ruang bekas tambang sebagai sumber penghidupan melalui wisata dan UMKM.

Temuan wawancara memperkuat pembacaan tersebut. IU-1 menjelaskan bahwa keluarganya memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas tambang lama di Tebing Breksi karena orang tuanya dahulu bekerja sebagai penambang. Setelah kawasan berkembang menjadi destinasi wisata, masyarakat memperoleh peluang ekonomi baru melalui UMKM. Informan menjelaskan:

“Orang tua saya dulu ikut menambang di sini. Setelah Tebing Breksi jadi tempat wisata, masyarakat bisa membuka usaha dan terbantu lewat UMKM.” (Wawancara IU-1, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara ekonomi lama berbasis tambang dan ekonomi baru berbasis pariwisata. Generasi sebelumnya menggantungkan penghidupan pada aktivitas penambangan, sedangkan generasi berikutnya memperoleh ruang ekonomi melalui usaha di kawasan wisata. Dengan kata lain, transformasi Tebing Breksi tidak hanya tampak pada perubahan lanskap, tetapi juga pada perubahan cara masyarakat memperoleh penghasilan. Kasus ini memperkuat argumen Ellis (2000) dan Scoones (1998) bahwa masyarakat pedesaan merespons perubahan sumber penghidupan melalui diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan aset dan peluang yang tersedia di lingkungan sekitarnya.

Keberhasilan transformasi tersebut juga tampak dari adanya pengaturan akses ekonomi yang berpihak kepada warga lokal. Temuan dari IU-2, pelaku UMKM dari luar wilayah

Sambirejo, menunjukkan bahwa pengelolaan lapak tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pelaku usaha dari luar daerah dikenakan biaya lapak yang jauh lebih tinggi dibanding warga lokal. Informan menjelaskan:

“Kalau dari luar itu sewanya sekitar enam ratus ribu per hari, sedangkan warga lokal jauh lebih ringan, sekitar tiga puluh ribu.” (Wawancara IU-2, 2026)

Perbedaan tarif tersebut menunjukkan adanya mekanisme proteksi ekonomi bagi warga lokal. Pengelola tidak membiarkan ruang usaha sepenuhnya dikuasai oleh pelaku luar yang mungkin memiliki modal lebih besar, tetapi mengatur agar masyarakat sekitar memiliki hambatan masuk yang lebih rendah untuk terlibat dalam ekonomi wisata. Temuan ini sejalan dengan studi Mervelito et al. (2020) yang membaca keberhasilan pengelolaan Tebing Breksi melalui pendekatan community-based tourism. Dalam pendekatan tersebut, partisipasi dan akses masyarakat lokal menjadi unsur penting agar pengembangan destinasi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama.

Secara kelembagaan, profil BUMKal Sambimulyo juga menunjukkan bahwa keberadaan Tebing Breksi terhubung dengan agenda pengembangan desa, seperti peningkatan pendapatan asli desa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, transformasi Tebing Breksi tidak dapat hanya dibaca sebagai proyek wisata, tetapi sebagai bagian dari strategi ekonomi lokal. Temuan ini memperluas argumen livelihood diversification karena peralihan mata pencaharian di Sambirejo tidak berlangsung secara individual semata, melainkan dimediasi oleh kelembagaan desa, pengelolaan destinasi, dan kebijakan akses yang berpihak kepada warga lokal. Pada titik inilah perubahan pascatambang dapat dibaca sebagai proses pemberdayaan, bukan sekadar perubahan komoditas ekonomi.

Dengan demikian, transformasi Tebing Breksi dari tambang ke wisata menjadi titik awal keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Perubahan ini membuka peluang ekonomi baru, menggeser ketergantungan pada aktivitas tambang, dan memberi ruang bagi warga lokal untuk terlibat langsung dalam ekonomi wisata. Lebih dari itu, perbedaan akses dan tarif lapak menunjukkan bahwa manfaat wisata diatur agar terlebih dahulu memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar. Karena itu, keberhasilan Tebing Breksi tidak hanya terletak pada statusnya sebagai destinasi wisata, tetapi pada kemampuannya mengubah struktur peluang ekonomi dan memperlihatkan keberpihakan nyata terhadap warga lokal.

Pemberdayaan sebagai Proses: Dari Fasilitasi Awal ke Kemandirian Kolektif

Keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi tidak hanya terlihat dari terbukanya ruang usaha bagi masyarakat lokal, tetapi juga dari proses kelembagaan yang memungkinkan masyarakat mengelola peluang tersebut secara bertahap. Dalam literatur partisipasi, pemberdayaan tidak cukup dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam suatu program, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk terlibat, memengaruhi keputusan, dan mengelola manfaat yang dihasilkan. Arnstein (1969) membedakan partisipasi yang bersifat semu dari partisipasi yang memberi kuasa nyata kepada warga. Pretty (1995) juga menekankan bahwa partisipasi yang kuat bukan hanya konsultasi, melainkan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan bersama.

Proses tersebut tampak dalam pengembangan kelembagaan Tebing Breksi. Setelah kawasan tambang dialihkan menjadi objek wisata, pengelolaan mulai dibentuk agar perubahan tersebut tidak berjalan secara spontan dan individual. Pengelolaan melalui Lowo Ijo menyediakan kerangka organisasi bagi masyarakat untuk beralih dari aktivitas tambang menuju aktivitas wisata. Dokumen pengelolaan Tebing Breksi menekankan prinsip rukun, gotong royong, dan transparan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada pembukaan peluang ekonomi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola bersama. Dalam kerangka Sulistiyani (2017), proses ini sejalan dengan tahapan pemberdayaan dari penyadaran, transformasi kemampuan, hingga peningkatan kemampuan menuju kemandirian.

Temuan wawancara dengan IU-1 memperkuat hal tersebut. Informan menjelaskan bahwa pada tahap awal, lokasi dan sarana-prasarana usaha disediakan oleh pengelola Tebing Breksi. Fasilitas ini menjadi input penting karena memberi akses awal bagi warga lokal untuk masuk ke ekonomi wisata tanpa harus menanggung beban pembiayaan infrastruktur sejak awal. Namun, proses tersebut tidak berhenti pada penyediaan fasilitas. Setelah usaha berjalan, pengelolaan sarana-prasarana menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku UMKM. Peralihan ini menunjukkan adanya dorongan menuju kemandirian, karena pelaku usaha tidak terus-menerus bergantung pada pengelola, tetapi mulai memikul tanggung jawab atas keberlanjutan usahanya.

Aspek yang lebih kuat adalah terbentuknya kelompok UMKM oleh para pelaku usaha. Informan menjelaskan bahwa pelaku UMKM membentuk kelompok sendiri dan menggunakan kelompok tersebut sebagai ruang untuk membahas persoalan usaha. Masalah-masalah yang muncul tidak diselesaikan secara individual, tetapi dibicarakan bersama untuk menghasilkan keputusan kolektif. IU-1 menyampaikan:

“Kami punya kelompok sendiri. Kalau ada masalah, biasanya dibahas bersama dan diputuskan bersama.” (Wawancara IU-1, 2026)

Kutipan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemberdayaan di Tebing Breksi tidak hanya berlangsung secara top-down dari pemerintah atau pengelola. Pelaku UMKM juga membangun mekanisme swakelola yang bersifat bottom-up. Dalam kerangka Sulistiyani (2017), kondisi ini menunjukkan bergeraknya masyarakat menuju tahap peningkatan kemampuan, ketika warga mulai memiliki inisiatif, kemampuan mengambil keputusan, dan kapasitas untuk mengelola persoalan bersama. Pemberdayaan dalam hal ini tidak hanya berupa pemberian ruang usaha, tetapi juga proses membentuk kapasitas kolektif.

Kelompok UMKM juga dapat dibaca sebagai bentuk kompetensi komunitas. Sulistiyani (2017) menjelaskan bahwa komunitas yang berdaya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menyepakati prioritas, menentukan cara mencapai tujuan, dan bekerja sama secara rasional. Temuan di Tebing Breksi menunjukkan arah tersebut. Kelompok UMKM bukan hanya wadah administratif, tetapi juga berfungsi sebagai ruang komunikasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya kelompok tersebut, para pelaku usaha tidak lagi bergerak sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai komunitas ekonomi lokal yang memiliki mekanisme internal untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

Dalam konteks pariwisata, proses ini penting karena community-based tourism sering gagal ketika masyarakat hanya dijadikan simbol partisipasi tanpa kontrol yang memadai. Tosun (2000) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pariwisata kerap dibatasi oleh hambatan operasional, struktural, dan kultural. Blackstock (2005) juga mengkritik community-based tourism yang terlalu mudah mengklaim keberpihakan kepada komunitas, tetapi tidak selalu memastikan kontrol komunitas atas pengambilan keputusan. Kasus Tebing Breksi menunjukkan gejala yang lebih positif karena pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang berjualan, tetapi juga membentuk kelompok, membahas masalah, dan menyepakati solusi bersama. Partisipasi yang muncul tidak berhenti pada kehadiran pelaku UMKM dalam kawasan wisata, tetapi mulai bergerak ke arah kapasitas kolektif.

Proses pemberdayaan tersebut juga didukung oleh kelembagaan desa melalui BUMKAL Sambimulyo. Keberadaan BUMKAL memperlihatkan bahwa pengembangan Tebing Breksi tidak berdiri sebagai aktivitas wisata yang terpisah dari agenda pembangunan desa. BUMKAL ditempatkan sebagai pilar ekonomi kalurahan dengan misi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, menggali potensi desa, dan membuka pola wirausaha masyarakat yang mandiri serta berkesinambungan. Pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi berlangsung dalam ekosistem kelembagaan yang lebih luas, yaitu hubungan antara pengelola wisata, BUMKAL, pemerintah desa, dan masyarakat pelaku usaha.

Temuan ini memperluas argumen Arnstein (1969) dan Pretty (1995) karena partisipasi pelaku UMKM di Tebing Breksi tidak berhenti pada keterlibatan dalam program, tetapi berkembang menjadi kapasitas kolektif untuk membahas masalah dan mengambil keputusan bersama. Pada saat yang sama, kasus ini menjawab kritik Blackstock (2005) dan Tosun (2000) terhadap community-based tourism yang sering bersifat simbolik. Dalam kasus Tebing Breksi, pelaku UMKM memiliki ruang organisasi sendiri untuk mengelola persoalan usaha. Di titik inilah pemberdayaan dapat dibaca sebagai proses yang bergerak dari fasilitasi awal menuju kemandirian kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi terletak pada pergeseran dari bantuan awal menuju kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi diri. Pada awalnya, masyarakat memperoleh dukungan berupa ruang usaha, sarana-prasarana, dan pengelolaan kawasan. Dalam perkembangannya, pelaku UMKM mengambil peran aktif melalui pengelolaan usaha masing-masing dan pembentukan kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama. Pola ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian akses ekonomi, tetapi berkembang menjadi kemampuan masyarakat untuk mengelola manfaat secara kolektif.

Nilai Sosial Pemberdayaan: Pendapatan, Taraf Hidup, dan Kesejahteraan Lokal

Keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi selanjutnya tidak cukup apabila hanya dinilai dari terbukanya lapak usaha atau meningkatnya aktivitas wisata. Dalam kerangka evaluasi pemberdayaan, keberhasilan perlu dibaca lebih luas hingga sampai pada level outcome dan dampak, yakni perubahan pendapatan, kualitas hidup, partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pemberdayaan menempatkan outcome sebagai peningkatan pendapatan, akses layanan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kesadaran masyarakat. Sedangkan dampak mencakup peningkatan kualitas hidup,

kemandirian desa, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep tersebut, maka nilai sosial Tebing Breksi perlu dilihat bukan hanya dari omzet UMKM, tetapi juga dari perubahan hidup yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Tebing Breksi memberi manfaat ekonomi langsung bagi pelaku UMKM lokal. IU-1 menjelaskan bahwa masyarakat merasa terbantu oleh pengembangan wisata, baik melalui peningkatan peluang usaha maupun perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Dalam kerangka Sulistiyani (2017), temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan mulai bergerak dari sekadar pembukaan akses menuju peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber penghidupan sendiri. Pemberdayaan yang berhasil tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mengarah pada kemampuan masyarakat untuk berinisiatif, mengelola peluang, dan membangun kemandirian.

Nilai ekonomi tersebut juga tampak pada skala kelembagaan desa. Profil BUMKAL Sambimulyo menunjukkan bahwa unit Taman Wisata Tebing Breksi melibatkan 524 orang, yang terdiri dari pengelola, driver jip, pelaku hunting photo, pedagang, guide, trainer outbound, dan tenaga pembangunan. Kemudian dari jumlah tersebut, untuk pedagang sendiri mencapai 180 orang. Data ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa Tebing Breksi tidak hanya menciptakan peluang bagi satu-dua pelaku usaha semata, tetapi juga dapat membangun ekosistem kerja lokal yang luas. Selain itu, tercatat juga bahwa pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.519.534.486 dengan kontribusi PADes sebesar Rp525.435.411. Angka ini menunjukkan bagaimana manfaat ekonomi Tebing Breksi tidak hanya berhenti pada level rumah tangga pelaku UMKM, tetapi juga masuk ke struktur keuangan desa.

Nilai sosial pemberdayaan juga terlihat dari peningkatan taraf hidup. Informan pelaku UMKM menjelaskan bahwa manfaat Tebing Breksi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga berdampak pada perbaikan kualitas hidup, salah satunya akses air yang menjadi lebih mudah. IU-1 menyampaikan:

“Masyarakat sangat terbantu, bukan hanya ekonomi, tetapi juga taraf hidup. Akses air juga menjadi lebih mudah.” (Wawancara IU-1, 2026)

Temuan ini penting karena akses air merupakan kebutuhan dasar, sehingga perubahan tersebut menunjukkan bahwa dampak wisata melampaui transaksi jual beli. Akses dasar dan kualitas hidup merupakan bagian dari indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, manfaat Tebing Breksi perlu dibaca sebagai nilai sosial, bukan berhenti pada nilai ekonomi. Hal ini juga relevan dengan pendekatan Social Return on Investment. SROI digunakan untuk memahami nilai sosial yang tercipta dari suatu intervensi, termasuk manfaat yang tidak selalu tertangkap oleh ukuran keuangan biasa. Nicholls (2017) menjelaskan bahwa SROI berkembang sebagai pendekatan untuk menilai nilai yang diciptakan oleh aktivitas manusia, termasuk nilai yang melampaui manfaat finansial langsung.

Argumen ini sejalan dengan Scheyvens (1999), yang menekankan bahwa pariwisata dapat disebut memberdayakan ketika komunitas lokal memperoleh manfaat ekonomi, sosial, psikologis, dan politik dari aktivitas wisata. Dalam kasus Tebing Breksi, dimensi ekonomi tampak melalui berkembangnya UMKM dan lapangan kerja lokal; dimensi sosial terlihat

melalui kelompok UMKM dan kerja kolektif; sedangkan dimensi kesejahteraan tampak dari perbaikan taraf hidup dan akses air. Temuan ini juga dekat dengan Boley dan McGehee (2014), yang menempatkan persepsi manfaat ekonomi, sosial, dan psikologis sebagai bagian penting dalam menilai pemberdayaan warga melalui pariwisata.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan dalam pariwisata tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Kasus Tebing Breksi menunjukkan bahwa nilai sosial pemberdayaan muncul melalui kombinasi antara pendapatan, lapangan kerja lokal, kontribusi kelembagaan desa, akses air, dan kapasitas kolektif. Dalam perspektif SROI, manfaat tersebut penting karena nilai sosial tidak selalu dapat direduksi menjadi angka finansial. Nilai sosial justru terlihat dari bagaimana aktivitas wisata mengubah kondisi hidup, memperluas peluang ekonomi, dan memperkuat kemampuan masyarakat mengelola manfaat yang muncul dari perubahan kawasan.

Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan manfaat yang melampaui pendapatan individual. Pengembangan wisata membuka ruang ekonomi bagi warga, memperluas lapangan kerja lokal, memperkuat peran BUMKAL sebagai kelembagaan ekonomi desa, dan menghasilkan manfaat sosial yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Keberhasilannya bukan hanya karena masyarakat memperoleh tempat berusaha, tetapi karena pengembangan wisata mampu menghubungkan akses ekonomi, peningkatan taraf hidup, kontribusi kelembagaan desa, dan kesejahteraan lokal.

Sintesis Nilai Sosial dan Keberlanjutan Pemberdayaan UMKM

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi dapat dipahami sebagai hasil dari keterhubungan antara transformasi penghidupan, akses ekonomi lokal, penguatan kelembagaan, dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Transformasi dari kawasan tambang menjadi destinasi wisata telah menciptakan struktur peluang ekonomi baru bagi warga Sambirejo. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya terletak pada munculnya aktivitas wisata, melainkan pada kemampuan pengelolaan Tebing Breksi untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam ekonomi wisata. Hal ini tampak dari tersedianya ruang usaha bagi warga lokal, adanya tarif lapak yang lebih berpihak kepada masyarakat sekitar, terbentuknya kelompok UMKM, dan munculnya manfaat ekonomi maupun sosial yang dirasakan pelaku usaha.

Jika temuan-temuan tersebut dibaca dengan menggunakan pendekatan Social Return on Investment, pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi menunjukkan hubungan yang cukup jelas antara input, output, outcome, dan impact. Input pemberdayaan disini terlihat dari fasilitasi pemerintah, penyediaan lokasi dan sarana awal oleh pengelola, kelembagaan BUMKAL, serta kebijakan tarif lapak yang lebih murah bagi warga lokal. Input tersebut kemudian menghasilkan output berupa berkembangnya UMKM, terbentuknya kelompok pelaku usaha, bertambahnya lapangan kerja wisata, dan meluasnya aktivitas ekonomi lokal. Output tersebut selanjutnya berkembang menjadi outcome berupa peningkatan pendapatan, perbaikan taraf hidup, kemudahan akses air, serta tumbuhnya kapasitas kolektif pelaku UMKM. Sementara pada tingkat dampak, Tebing Breksi mendorong transformasi

penghidupan masyarakat dari ekonomi tambang menuju ekonomi wisata yang jauh lebih beragam.

Untuk memperjelas hubungan antara proses pemberdayaan dan nilai sosial yang dihasilkan, temuan-temuan lapangan kami sintesiskan melalui kerangka SROI. Tabel ini digunakan untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, impact, dan aspek keberlanjutan dalam pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi seperti sebagai berikut:

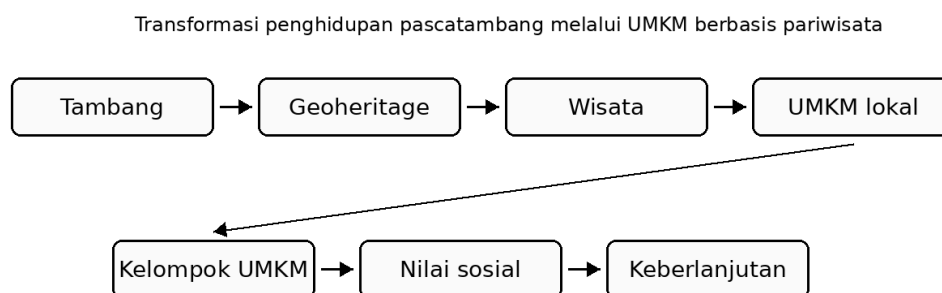
Tabel 3. Elemen SROI

Elemen SROI	Temuan Tebing Breksi	Nilai Sosial yang Dihasilkan
Input	Fasilitasi pemerintah, sarana-prasarana awal, pengelolaan kawasan, tarif lapak murah bagi warga lokal	Menurunkan hambatan warga lokal untuk masuk ke ekonomi wisata
Output	UMKM berkembang, kelompok pelaku usaha terbentuk, lapangan kerja wisata terbuka	Terbentuknya ruang ekonomi lokal
Outcome	Pendapatan terbantu, taraf hidup membaik, akses air lebih mudah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Impact	Pergeseran dari ekonomi tambang menuju ekonomi wisata	Transformasi penghidupan masyarakat lokal
Sustainability	Promosi dan kunjungan wisata perlu terus dijaga	Keberlanjutan manfaat pemberdayaan

Sumber: diolah oleh Penulis, 2026

Sintesis tersebut menunjukkan bahwasanya nilai sosial Tebing Breksi tidak dapat direduksi hanya pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Nilai sosial yang lebih penting justru tampak pada terbukanya akses ekonomi bagi warga lokal, adanya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi diri, serta meningkatnya kualitas hidup para pelaku dan masyarakat setempat. Dalam kerangka pemberdayaan Sulistiyani (2017), kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek penerima program, tetapi telah bergerak menuju posisi sebagai subjek yang mampu mengelola peluang dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Adanya kelompok UMKM disini menjadi bukti bahwa kapasitas komunitas mulai terbentuk, karena pelaku usaha memiliki ruang untuk membahas persoalan, menentukan solusi, dan mengambil keputusan bersama.

Gambar 1. Alur Transformasi Pemberdayaan UMKM Tebing Breksi



Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi berjalan sebagai proses bertahap. Perubahan tidak berhenti pada penetapan geoheritage atau pembukaan destinasi wisata, tetapi berlanjut pada pembentukan ruang ekonomi lokal, penguatan organisasi pelaku UMKM, dan munculnya nilai sosial. Dengan demikian, diagram ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya berada pada hasil akhir, tetapi pada rantai proses yang menghubungkan perubahan kawasan, akses ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan manfaat.

Meskipun demikian, keberhasilan pemberdayaan tersebut tetap membutuhkan syarat penting, yaitu keberlanjutan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih sangat bergantung pada keramaian wisatawan. Harapan agar promosi Tebing Breksi terus dilakukan menunjukkan bahwa keberlanjutan manfaat ekonomi tidak dapat dilepaskan dari stabilitas kunjungan wisata. IU-1 menjelaskan:

“Harapannya promosi tetap berjalan supaya Tebing Breksi tetap ramai, karena keramaian itu berdampak langsung bagi kami sebagai pelaku UMKM.” (Wawancara IU-1, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan belum dapat dibaca sebagai kondisi final. Dalam jangka panjang, pemberdayaan UMKM tidak cukup dijaga melalui penyediaan lapak atau fasilitas awal, tetapi juga melalui strategi promosi, inovasi produk, penguatan kapasitas usaha, dan tata kelola kelembagaan yang konsisten. Tanpa dukungan tersebut, manfaat ekonomi yang telah terbentuk berisiko melemah ketika jumlah wisatawan menurun. Dalam konteks ini, keberlanjutan menjadi bagian dari nilai sosial itu sendiri karena manfaat pemberdayaan harus dapat dipertahankan, bukan hanya dicapai pada fase awal transformasi.

Temuan ini memperkuat perdebatan dalam community-based tourism bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya ditentukan oleh partisipasi awal masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan lokal menjaga distribusi manfaat, kapasitas kolektif, dan keberlanjutan ekonomi. Goodwin dan Santilli (2009) mengingatkan bahwa community-based tourism sering terlalu mudah diklaim berhasil tanpa evaluasi manfaat jangka panjang. Kasus Tebing Breksi menunjukkan arah yang lebih menjanjikan karena terdapat akses ekonomi bagi warga lokal, dukungan kelembagaan desa, dan kelompok UMKM. Namun, temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan tetap harus

dirawat melalui tata kelola promosi, penguatan produk lokal, dan keberlanjutan sarana-prasarana.

Dengan demikian, Tebing Breksi dapat dibaca sebagai praktik pemberdayaan masyarakat yang relatif berhasil karena mampu mengubah ruang bekas tambang menjadi sumber penghidupan baru, membuka akses ekonomi bagi warga lokal, memperkuat kapasitas kolektif pelaku UMKM, dan menghasilkan manfaat sosial yang melampaui pendapatan individual. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dipahami sebagai capaian final. Ia perlu terus dirawat melalui promosi berkelanjutan, penguatan kelompok UMKM, dukungan sarana-prasarana, dan peningkatan kapasitas usaha agar manfaat pemberdayaan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara mandiri.

CONCLUSION

Dalam kerangka *Social Return on Investment*, nilai sosial Tebing Breksi tidak hanya muncul dalam bentuk pendapatan UMKM, tetapi juga dalam terbukanya lapangan kerja lokal, peningkatan taraf hidup, kemudahan akses air, kontribusi terhadap ekonomi desa, serta terbentuknya kapasitas kolektif pelaku UMKM. Manfaat pemberdayaan tersebut bersifat multidimensional karena menyentuh aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan ini tetap memerlukan penguatan keberlanjutan karena pelaku UMKM masih bergantung pada keramaian wisatawan dan promosi destinasi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi tidak boleh berhenti pada penyediaan ruang usaha, tetapi perlu dilanjutkan melalui penguatan kapasitas usaha, inovasi produk, promosi berkelanjutan, dan tata kelola kelembagaan yang konsisten.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan temuan penelitian. Pertama, penelitian dilakukan dalam rangkaian kegiatan perkuliahan lapangan sehingga waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data sangat terbatas. Hal ini membatasi kesempatan peneliti untuk dapat melakukan observasi secara mendalam atau menjangkau lebih banyak informan yang terlibat dalam kegiatan UMKM di kawasan Tebing Breksi. Kedua, data utama dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan dua pelaku UMKM yakni pelaku UMKM lokal dan luar wilayah. Adanya hal ini, temuan yang didapatkan lebih menunjukkan pengalaman dan sudut pandang informan yang diwawancarai sehingga tak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku UMKM di kawasan Tebing Breksi.

Ketiga, dalam penelitian ini terbatas untuk memperoleh data kuantitatif yang lengkap seperti tingkat pendapatan sebelum dan sesudah dijadikan kawasan geoheritage. Keterbatasan ini mengakibatkan analisis melalui kerangka SROI belum dapat dilakukan secara penuh untuk dapat menghasilkan rasio SROI. Maka dari itu, kerangka SROI dalam penelitian ini lebih digunakan secara kualitatif sebagai alat untuk mengevaluasi input, output, outcome, dan dampak sosial yang muncul dari pengembangan UMKM di kawasan wisata Tebing Breksi.

Berangkat dari temuan-temuan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, keberhasilan pemberdayaan UMKM di Tebing Breksi perlu dijaga agar tidak hanya berhenti sebagai keberhasilan awal, tetapi dapat berkembang menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Promosi Tebing Breksi perlu dilakukan secara konsisten. Pengelola, BUMKAL, pemerintah desa, dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergitas dalam promosi melalui media sosial, event wisata, paket kunjungan, dan kerja sama dengan komunitas atau pelaku industri wisata. Hal ini penting karena keberlanjutan UMKM sangat bergantung pada stabilitas kunjungan wisatawan; Kelompok UMKM perlu diperkuat sebagai forum resmi dalam tata kelola destinasi. Kelompok yang selama ini digunakan untuk membahas masalah perlu dikembangkan menjadi kanal penyampaian aspirasi, pencatatan persoalan usaha, dan pelibatan pelaku UMKM dalam perencanaan pengembangan kawasan; Pelaku UMKM perlu mendapat pelatihan secara berkelanjutan. Pelatihan dapat diarahkan pada manajemen keuangan, inovasi produk, pengemasan, pelayanan wisatawan, pemasaran digital, dan penggunaan pembayaran non-tunai. Ini penting agar UMKM tidak hanya bergantung pada lokasi wisata yang ramai, tetapi juga memiliki daya saing usaha; Dukungan sarana-prasarana dasar perlu tetap dijaga. Fasilitas seperti air, listrik, kebersihan, tempat sampah, dan area usaha perlu terus diperhatikan oleh pengelola dan BUMKAL. Kemandirian pelaku UMKM memang penting, tetapi beban pemeliharaan fasilitas tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha kecil; Produk UMKM perlu dikaitkan dengan identitas lokal Tebing Breksi dan Sambirejo. Pengembangan kuliner, souvenir, dan produk khas lokal akan memperkuat daya tarik destinasi sekaligus membuat UMKM menjadi bagian dari narasi wisata, bukan sekadar aktivitas jual beli.

ACKNOWLEDGEMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada jurusan Magister Administrasi Publik, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada yang telah mendukung penelitian ini.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

MG bertanggung jawab atas penulisan bagian Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan. HL bertanggung jawab atas penulisan bagian Pendahuluan dan Metode. ATS memberikan arahan dan pendampingan selama proses penelitian. AE memberikan evaluasi, menyusun abstract dan administrasi penelitian.

AI USAGE STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan karya ini terbatas hanya untuk membantu penyuntingan bahasa, pengecekan tata bahasa, dan meningkatkan kejelasan serta keterbacaan teks. AI tidak digunakan untuk menghasilkan ide utama, melakukan analisis, menafsirkan data, atau menarik kesimpulan ilmiah. Penulis bertanggung jawab penuh atas orisinalitas, keakuratan, dan integritas akademis seluruh isi artikel ini. AI tidak tercantum sebagai penulis atau kontributor dalam karya ini.

CONFLICT OF INTEREST

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak mana pun terkait dengan proses penelitian.

BIBLIOGRAPHY

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Usaha Milik Kalurahan Sambimulyo. (2025). Laporan pertanggungjawaban BUMKal Sambimulyo tahun 2023: Profil Badan Usaha Milik Kalurahan Sambimulyo Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman tahun 2025 [Laporan].
- Bambang, Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(3), 142–155. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122>
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi005>
- Boley, B. B., & McGehee, N. G. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS). *Tourism Management*, 45, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.04.003>
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? (ICRT Occasional Paper No. 11). International Centre for Responsible Tourism.
- Iqbal, M., Nadia, H., & Saiddinullah, A. (2020). Geo-Edu Space untuk pengembangan geowisata Tebing Breksi sebagai sarana memasyarakatkan edukasi ilmu kebumiharian. *Jurnal Geosains Terapan*, 3(1), 1–9.
- Kusumaningrum, N., & Ridlo, D. T. (2023). Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemanfaatan ruang untuk pariwisata di area bekas tambang Tebing Breksi. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 23(2), 31–43. <https://doi.org/10.37412/jrl.v23i2.200>
- Mannahali, M., Asri, W. K., Fatimah, S., Azizah, L., & Angreany, F. (2024). Pemberdayaan ekonomi: Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan untuk masyarakat pedesaan. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/ininnawa.v2i2.5381>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Mervelito, M. G. P., Rahardjo, P., & Herlambang, S. (2020). Studi keberhasilan pengelolaan objek wisata Taman Tebing Breksi berbasis community based tourism (CBT) oleh masyarakat Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), 2673–2684. <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8880>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nicholls, J. (2017). Social return on investment. *Development and convergence. Evaluation and Program Planning*, 64, 127–135. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.11.011>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)

- Putri, & Nailufar. (2022, November 21). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>
- Rachmawati, E., Fountain, J., & Mackay, M. (2021). Factors influencing economic empowerment in tourism development. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(2), 223–234. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i2.917>
- Rhodes, R. A. W. (1996). *The new governance: Governing without government*. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G)
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Scheyvens, R., & van der Watt, H. (2021). Tourism, empowerment and sustainable development: A new framework for assessing tourism's contribution to the Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(22), 12606. <https://doi.org/10.3390/su132212606>
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies, University of Sussex.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2017). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Gava Media.
- Sulistiyani, A. T. (n.d.). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan [PowerPoint slides]. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Suyanto, A. (2024, Januari 3). Manfaatkan fasilitas, UMKM naik kelas. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/en/node/103988>
- Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). How community-based tourism improves community welfare? A practical case study of “governing the commons” in rural Nglanggeran, Indonesia. *The International Journal of Community and Social Development*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.1177/25166026241228717>
- Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. (2022). Metode penelitian kualitatif: Penerapan pada kajian politik pemerintahan. UB Press.
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Uphoff, N. (1986). *Local institutional development: An analytical sourcebook with cases*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Widiyanto, K. (n.d.). Profil Dewi Sambi dan Taman Tebing Breksi [Dokumen presentasi].
- Yudha, S. A., Zacky, F. M., Helmi, R. F., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui program usaha mikro di Desa Maninjau. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 977–985. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2550>